
KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh

Sari Wulandari¹, Ahmad Prayendi Dasopang², Ginie Aulia Rawani³, Idzni Hasfizetty⁴,
Muhammad Yunus Sofian⁵, Reni Dwijaya⁶, Selfia Rachmalija⁷.

¹Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

^{2,3,4,5,6,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹sariwulandari@umnaw.ac.id, ²ahmaddasopang12@gmail.com,

³g.auliarwni@gmail.com, ⁴idznihasfizetty@gmail.com, ⁵yunussofyan99@gmail.com,

⁶dwijayareni2000@gmail.com, ⁷rachmalijaselfia@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan program yang dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengolahan data yang dilakukan berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, referensi statistik, internet, dan sumber lain yang relevan, hasil penelitian menunjukkan Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu terdapat Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: Pertama, Kebijaksanaan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, Kebijaksanaan langsung, diarahkan kepada peningkatan peran serta produktifitas sumber daya manusia.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak sekali sumber daya alam di dalamnya. Kekayaan itu jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tentunya akan membawa Negara ini menuju kepada yang lebih baik lagi. Namun, Indonesia masih termasuk ke dalam Negara berkembang dan memiliki sejumlah masalah dan juga rumor terkait dengan permasalahan sosial, budaya, maupun ekonomi yang perlu untuk diperhatikan lebih mendalam. Permasalahan tersebut termasuk didalamnya mengenai kemiskinan. Ada ketidaksesuaian antara teori yang ada, konsep yang dibangun, dan juga perealisasi untuk menangani kemiskinan

tersebut dirasa hanya sedikit berpengaruh, bahkan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap upaya untuk menangani kemiskinan ini. Hasilnya, penanganan-penanganan tersebut hanya menjadi alat untuk menghamburkan biaya yang digunakan, namun tidak sesuai dengan hasil yang tidak sesuai seperti yang diharapkan.

Optimisme timbul diakibatkan banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai jalan dari pertanyaan seputar pengentasan kemiskinan seperti misalnya pemerataan pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, dan lainnya. Tetapi, saat ini timbul sebuah tren baru dimana kemiskinan bukan hanya sebuah keadaan seseorang yang

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, namun juga dalam bentuk gagalnya negara untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-hak warganegara untuk hidup sejahtera. Sebenarnya, Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya dan dapat menikmati kekayaan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Sumber Daya Alam vital yang dimiliki adalah seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh negara demi kepentingan dan juga kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 tersebut, kemiskinan merupakan sebuah masalah serius yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan satu sama lain. Hal itu diantaranya seperti tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, pengangguran, geografis, karakter, budaya, dan juga lainnya. Kemiskinan bukan hanya bisa ditemukan di daerah pedesaan, namun di perkotaan kemiskinan dapat dengan mudah ditemukan. Kemiskinan merupakan sebuah hal yang sudah ada sejak zaman sebelum reformasi Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan di negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan walaupun hasil yang didapatkan belum terlalu seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam program menanggulangi kemiskinan di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam program menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan

oleh langkanya alat pemenuh kebutuhan dasar, atau akses yang sulit terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah salah satu masalah global. Kemiskinan dipahami dari berbagai sudut pandang, yang paling utama adalah pandangan kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Pandangan tentang kebutuhan sosial seperti dikucilkan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini biasanya dibedakan karena mencakup masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi oleh ekonomi. Pandangan kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Ukuran yang digunakan para analis dalam menetapkan jumlah penduduk miskin adalah cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin apabila dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan asupan kalorinya minimal 2100 kkal/hari per kapita, atau pemenuhan kebutuhan pokok non makanan seperti yang dikemukakan diatas.

2. Konsep Kemiskinan

Keadaan dimana seseorang tidak mampu merawat dirinya sesuai tarap hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik disebut kemiskinan. Terdapat tiga aspek kemiskinan yaitu *Pertama*, kemiskinan multidimensi yang aertinya kebutuhan manusia beragam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer berupa miskin akan asset, organisasi politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. *Kedua*,

aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, yang berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek berpengaruh pada aspek lainnya. *Ketiga*, kemiskinan erat kaitannya dengan pedesaan dan sebagainya, faktanya yang mengalami kemiskinan adalah penduduk atau manusianya.

Pada umumnya ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut: *Pertama*, tidak memiliki faktor produksi sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi terbatas. *Kedua*, tidak memiliki kemungkinan memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, rendahnya tingkat pendidikan karena mencari nafkah diusia muda. *Keempat*, kebanyakan tinggal di pedesaan. *Kelima*, yang tinggal di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.

3. Indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan). *Kedua*, Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). *Ketiga*, Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). *Keempat*, Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa. *Kelima*, Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. *Keenam*, Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. *Ketujuh*, Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. *Kedelapan*, Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. *Kesembilan*, Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban

kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan:

a. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi.

Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

b. Masyarakat Pengangguran Meningkat.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat maka angka kemiskinan pun akan meningkat.

c. Pendidikan yang Rendah.

Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.

d. Terjadi Bencana Alam.

Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

e. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

5. Mengukur Kemiskinan

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat

tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

6. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan juga dapat memberikan dampak-dampak lain, berikut penjelasannya: *Pertama*, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apa pun, termasuk dengan kriminalitas. *Kedua*, angka kematian meningkat. Masyarakat miskin akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai sehingga dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat. *Ketiga*, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Masyarakat miskin tidak bisa membayar pendidikan yang cukup tinggi sehingga dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. *Keempat*, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan

yang layak. Sehingga, masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. *Kelima*, munculnya konflik antar masyarakat. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul.

7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,04% dari 27,55 juta pada September 2020 menjadi 27,54 juta. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan Maret 2020 sebesar 4,2%. Tingginya angka kemiskinan Indonesia disebabkan pandemic Covid-19. Pada maret 2021, penduduk miskin Indonesia sebesar 10,14%, angka ini hanya turun 0,05% dibandingkan dengan September 2020 sebesar 10,19%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 0,36% dari 9,78%.

Kemiskinan tertinggi sebesar 20,66% di Pula Maluku dan Papua, 13,84% di Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi 10,29%, dan Sumatera 10,15%. Persentase paling rendah terdapat di Pulau Jawa yaitu 9,67% dan Kalimantan 6,09%. Maka dapat dilihat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi disbanding dengan perkotaan, dimana angka kemiskinan di perdesaan mencapai dua digit yaitu 13,1% sementara di perkotaan sebesar 7,89%.

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengurai data secara deksrriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata yang diperoleh dari situasi alamiah.

Adapun metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan

berdasar literatur, terutama artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka wajib dilakukan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun praktis.

2. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas sumber data sekunder, yaitu penulis mengolah data yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, referensi statistik, internet, dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Kebijakan Anti Kemiskinan

Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdaya guna, pengkajian konsep, dan strategi penanganan kemiskinan terus menerus diupayakan dalam rangka menemukan model program yang tepat untuk menangani permasalahan yang *persistence* dan multidimensional ini. Menurut Bradshaw (2005) penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberlanjutannya yaitu pelaku, proses, evaluasi, dan dasar teori yang relevan.

Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Terhadap hal ini Dasgupta (2003) menyatakan desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini: (1) spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3) didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri, (4) memahami konsekuensi yang tidak diinginkan, dan (5) berbasis sumber daya lokal. Sementara Chambers, et al., sebagaimana dikutip oleh

Muktasam (2011) menyatakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam merancang program pengentasan kemiskinan adalah (1) kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dan (3) bersifat pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan perancangan program pengentasan kemiskinan adalah (1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) pengabaian nilai-nilai lokal dan bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4) pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusi investasi. Dengan memahami kaidah dalam merancang program penanggulangan akan dapat dihasilkan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima program.

2. Program Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dari lima fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan

fokus ini seperti, penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton dan stabilisasi/kepastian harga komoditas primer. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
2. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
3. Pelatihan budaya, motivasi usaha, dan teknis manajemen usaha mikro.
4. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
5. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
7. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
8. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
9. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
10. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Program pembangunan berbasis masyarakat untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin antara lain:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.

4. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain:

1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)
2. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit
3. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi seperti:

- a. Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
- b. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi, dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia:

1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Tetap mempertahankan program lama seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, dsb.
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp5000,- per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah.
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desadesa dan kampung-kampung paling miskin.
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list.
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementerian/lembaga.
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
14. Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur.
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
19. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan.
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik.
21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

3. Strategi dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia

Strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Menurut Lincoln Arsyad (2000) ada 4 strategi pembangunan ekonomi daerah, yaitu: *Pertama*, Strategi pengembangan fisik (locality or physical development strategy) untuk menciptakan identitas daerah kota, memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. *Kedua*, Strategi pengembangan dunia usaha (business development strategy) merupakan komponen yang penting karena daya tarik kreativitas atau daya tarik dunia usaha adalah cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. *Ketiga*, Strategi pengembangan sumber daya manusia (human resource development strategy) Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pelatihan, membuat bank keahlian, mendukung

lembaga ketrampilan dan pendidikan di daerah, dan mengembangkan lembaga pelatihan bagi orang cacat. *Keempat*, Strategi pengembangan masyarakat (community-based development strategy), kegiatan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat sosial.

4. Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, Kebijakan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Seperti suasana sosial politik yang tentram, ekonomi yang stabil, dan budaya yang berkembang. Upaya penggolongan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan perpajakan merupakan bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan. Pengendalian tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situasi yang kondusif bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskin. *Kedua*, Kebijakan langsung, diarahkan kepada peningkatan peran serta produktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberikan peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal, relevan dengan permasalahan, didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri, memahami konsekuensi yang tidak diinginkan, dan berbasis sumber daya lokal.
2. Beberapa program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal yaitu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
3. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, Kebijakan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, Kebijakan langsung, diarahkan kepada

peningkatan peran serta produktifitas sumber daya manusia.

2. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan maka harus meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang berstandar global. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah program penanggulangan kemiskinan harus berkelanjutan, dalam artian setiap pergantian pemerintahan program penanggulangan kemiskinan pemerintahan sebelumnya bukan dihapuskan, melainkan diteruskan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Setiono, Benny. 2014. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan.*, ISSN 2087-2607. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan. Vol. 5 No.1.
- [2] Ariyani, Nafiah, 2015. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 5
- [3] Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Ed 5, Penerbit: AMP YKPN
- [4] Barlinti, Yeni Salma. 2007. *Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Lex Jurnalica, Vol.4 No.3
- [5] Bradshaw, T. K. 2005. Theories of poverty and anti-poverty programs in community development. RPRC Working Paper No. 06-05. Conference on Development Economics, Washington, DC: World Bank
- [6] Dasgupta, P. 2003. World poverty: Causes and pathways. Paper presented at World Bank
- [7] Fadilla, Arif. 2017. *Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten*. ISSN: 2503-4413. Tangerang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 Nomor 1
- [8] Itang, 2013. *Penyebab Kemiskinan dan Cara Menanggulangnya*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.4 No.1
- [9] J. Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya).
- [10] Josef Papilaya. 2020. *Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal bimbingan dan konseling terapan. Volume. 4 No. 1.
- [11] Mukta zam dan Nurjanah, S. 2011. *Kajian kritis atas fenomena dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di pulau Lombok*. Laporan penelitian.
- [12] Mulyadi, Mohammad. 2016, *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*, Kajian Vol. 21 No. 3
- [13] Nunung, Nurwati. 2008. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol.10 No.1.
- [14] Rakhmat, Firdaus. 2019. *Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. ISSN : 2654-3141. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). Volume 1 Nomor 2.
- [15] Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat).
- [16] Sukardi, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT bumi aksara).
- [17] Wiratna Sujawerni, V. 2014. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- [18] www.bps.go.id.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN